

DOSEN UNTAR SEBAGAI PEMBICARA DI KOMINFO TERKAIT RANCANGAN PELATIHAN HUMAS TAHUN 2024

Muhammad Adi Pribadi¹, Naquita Nada² & Audrey Kirsten Tan³

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adip@fikom.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: naquitanda18@gmail.com

³Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: audrey.915220022@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Kemnaker Establishes SKKNI number 32, 2022, related to Public Relations or PR. PR work has significant changes in the digital era, where there is so much information, it needs to be managed well in order to maintain the reputation of companies and government institutions. SKKNI 32/2022 replaces SKKNI 629/2014 so that public relations work standards are in line with the development conditions of public relations work. The PR Competency Test needs to be adjusted to SKKNI 32/2022. The PR training material for the Junior PR scheme created in 2022 involves Dr Muhammad Adi Pribadi as an Untar academic, accompanied by Kominfo, as well as PR practitioners and other academics. LSPPRI as the organizer of the PR competency test on behalf of BNSP (National Professional Certification Agency) not only uses the new Public Relations SKKNI, but combines it with other SKKNI because public relations work currently intersects with other professions. The combination of SKKNI in creating competency test materials aims to adapt complex PR work so that it intersects with other professions. The implementation of the new competency test material will begin at the end of February 2024. He explained to Kominfo, PR practitioners and lecturers that the implementation of the competency test which will be carried out at the end of February 2024 is different in terms of the scheme and competency units because the competency test will be carried out using the new Public Relations SKKNI combined with other SKKNI. Dr Muhammad Adi Pribadi explained this to the invitees so that they would understand that the training materials created in 2022 would still use the old SKKNI, so he gave recommendations to create training materials for the Junior PR Officer scheme that were adapted to the new competency test materials.

Keywords: Public Relations, Untar, Kominfo

ABSTRAK

Kementerian Ketenagakerjaan RI Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) nomer 32, tahun 2022, terkait dengan Humas (Hubungan Masyarakat) atau PR (*Public Relations*). Pekerjaan PR mengalami perubahan yang signifikan di era digital, dimana informasi yang begitu banyak, perlu dikelola dengan baik agar dapat menjaga reputasi Perusahaan dan institusi pemerintah. SKKNI 32/2022 menggantikan SKKNI 629/2014 agar standar kerja kehumasan menjadi sesuai dengan kondisi perkembangan pekerjaan humas. Uji Kompetensi PR perlu disesuaikan dengan SKKNI 32/2022. Materi pelatihan PR untuk skema Junior PR yang dibuat pada tahun 2022 melibatkan Dr Muhammad Adi Pribadi sebagai akademisi Untar, yang didampingi Kominfo, serta praktisi PR dan akademisi lainnya. LSPPRI sebagai penyelenggara uji kompetensi PR atas nama BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) tidak hanya menggunakan SKKNI Humas yang baru, Namun mengkombinasikan dengan SKKNI lainnya karena pekerjaan humas saat ini bersinggungan dengan profesi lainnya. Kombinasi SKKNI dalam pembuatan materi uji kompetensi bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan PR yang kompleks sehingga bersinggungan dengan profesi lainnya. Penerapan materi uji kompetensi yang baru dimulai akhir februari 2024. Beliau menjelaskan kepada Kominfo, praktisi PR dan para dosen terkait pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan diakhir Februari 2024 berbeda dari sisi skema dan unit kompetensinya karena uji kompetensi yang dilakukan menggunakan SKKNI Humas yang baru yang dikombinasikan dengan SKKNI lainnya. Hal ini dipaparkan oleh Dr Muhammad Adi Pribadi, kepada undangan agar mereka paham bahwa materi pelatihan yang dibuat pada tahun 2022 masih menggunakan SKKNI lama sehingga Ia memberikan rekomendasi untuk membuat materi pelatihan skema Junior PR Officer yang disesuaikan dengan materi uji kompetensi yang baru.

Kata kunci: Hubungan Masyarakat, Untar, Kominfo

1. PENDAHULUAN

Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) akan menyelenggarakan pelatihan public relations dengan skema Junior Public Relations kepada para fresh graduate pada

tingkat strata satu dan diploma tiga di tahun 2024. Sebelumnya, Kominfo pernah melaksanakan pelatihan ini dan membuat modul pelatihannya diakhir tahun 2022. Kegiatan pembuatan modul dan pelatihan pada tahun 2022 melibatkan Dr Muhammad Adi Pribadi sebagai perwakilan akademisi yang memiliki pengalaman sebagai asesor uji kompetensi PR dari Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kegiatan pelatihan yang dilakukan secara gratis bagi para fresh Graduate ditujukan untuk mempercepat perolehan sertifikat profesi dari BNSP yang menjadi program pemerintah. Dimana Presiden RI, Ir Joko Widodo, melakukan rapat terbatas dengan para menteri pada tahun 2018 terkait percepatan penambahan jumlah pemilik sertifikat profesi dari BNSP untuk para tenaga kerja terampil. Oleh karenanya, Kominfo melakukan pelatihan secara gratis untuk profesi Humas dan profesi lainnya dalam upaya untuk mempercepat perolehan sertifikat profesi dari BNSP.

Para peserta yang telah mengikuti pelatihan dari kominfo akan mengikuti uji sertifikat profesi dari LSP (Lembaga Sertifikat Profesi) yang telah ditunjuk oleh BNSP untuk penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat profesi. Untuk profesi Humas, penyelenggaraan uji sertifikat profesinya dilakukan oleh LSPPRI atas nama BNSP

Dr Muhammad Adi Pribadi diundang oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi Dan Informatika), 16 Januari 2024, sebagai pembicara secara daring terkait perkembangan uji kompetensi PR di tahun 2024. Pada dasarnya, Kominfo ingin mengetahui kesesuaian antara modul pelatihan yang dibuat tahun 2022 dengan kondisi uji kompetensi yang dilakukan pada tahun 2024. Sejak Kementerian Ketenagakerjaan RI menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) nomer 32, tahun 2022, terkait dengan Humas (Hubungan Masyarakat) atau PR (Public Relations) maka terdapat perubahan standar kerja PR yang disesuaikan dengan kondisi terkini dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan PR mengalami perubahan yang signifikan di era digital, dimana informasi yang begitu banyak perlu dikelola dengan baik agar dapat menjaga reputasi perusahaan dan institusi pemerintah.

Profesi Humas menjadi vital bagi organisasi sehingga Perusahaan dan Lembaga negara perlu memiliki personil humas yang memiliki keterampilan kerja yang professional agar dapat mendukung kinerja organisasi. Oleh karenanya diperlukan SKKNI agar para professional PR memiliki standar kerja yang jelas. SKKNI 32/2022 menggantikan SKKNI 629/2014 agar standar kerja kehumasan menjadi sesuai dengan kondisi perkembangan pekerjaan humas. Uji Kompetensi PR perlu disesuaikan dengan SKKNI 32/2022.

LSPPRI sebagai penyelenggara uji kompetensi PR atas nama BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) tidak hanya menggunakan SKKNI Humas yang baru, Namun mengkombinasikan dengan SKKNI dari profesi lainnya. Kombinasi SKKNI dalam pembuatan materi uji kompetensi bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan PR yang kompleks sehingga bersinggungan dengan profesi lainnya. Penerapan materi uji kompetensi yang baru dimulai pada bulan february 2024.

Dr Muhammad Adi Pribadi mendapatkan undangan dari Kominfo karena beliau adalah seorang asesor dari LSPPRI sekaligus akademisi dari Universitas Tarumanagara. Beliau memberikan penjelasan kepada Kominfo, praktisi PR dan dosen universitas terkait pelaksanaan uji kompetensi yang telah dilakukan pada akhir Februari 2024, berbeda dari sisi skema dan unit kompetensinya karena uji kompetensi yang dilakukan menggunakan SKKNI Humas yang baru yang dikombinasikan dengan tiga SKKNI dari profesi lainnya.

LSPPRI baru mendapatkan persetujuan untuk menerapkan skema dan unit kompetensi yang sesuai dengan SKKNI yang baru setelah mendapatkan persetujuan dari BNSP di akhir tahun 2023 sehingga tidak bisa langsung menerapkan SKKNI Humas yang baru. Hal ini akan dipaparkan oleh salah satu Dosen Untar, Dr Muhammad Adi Pribadi kepada Kominfo, praktisi PR dan para dosen Permasalahannya adalah Kominfo, praktisi PR dan para dosen dari beberapa universitas ternama di Jakarta melihat materi pelatihan yang diselenggarakan Kominfo untuk persiapan uji kompetensi PR sudah tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan di dunia PR. Perhumas sebagai perwakilan dari profesi Humas melihat materi pelatihan PR tahun 2022 tidak relevan dengan pekerjaan PR saat ini karena pekerjaan PR banyak berkaitan dengan digital, dimana ruang lingkup modul tidak ada materi terkait dengan itu. Kominfo ikut mempertanyakan kesesuaian modul pelatihan dengan SKKNI 32/2022. Sedangkan dari kalangan akademisi memiliki kesamaan pemikiran dengan Perhumas dan Kominfo.

Tujuan kehadiran sebagai pembicara di Kominfo adalah untuk menjelaskan alasan modul pelatihan di tahun 2022 masih relevan untuk digunakan sebagai bahan pelatihan di tahun 2022 hingga 2023. Namun Dr Muhammad Adi Pribadi memberikan alasan penting untuk merevisi modul pelatihan tersebut apabila Kominfo ingin menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi di tahun 2024 karena modul pelatihan yang dibuat pada tahun 2022 tidak sesuai dengan materi uji kompetensi tahun 2024 yang menggunakan SKKNI terkini.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Ketua PKM menggunakan pendekatan interaksi simbolik dalam membuat pemaparan kepada peserta yang hadir. Interaksi simbolik adalah teori yang disampaikan oleh George Herbert Mead. Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan komunikasi perlu tercapainya pemaknaan yang sama untuk tercapainya saling pengertian, yang pada akhirnya setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat bekerjasama (Pribadi, 2018; West dan Turner, 2010; Charon, 2007). Untuk bisa tercapainya kesamaan makna, para peserta rapat perlu menempatkan dirinya seperti orang yang diajak berbicara agar ia memahami cara berkomunikasi dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pihak – pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Cara komunikasi yang baik tentu menggunakan bahasa Indonesia karena semua pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah orang Indonesia. Untuk memahami kebutuhan informasi, pemberi informasi sudah bisa memperkirakan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh mereka karena mereka tidak memiliki akses informasi tersebut tetapi info tersebut dimiliki oleh pemberi informasi.

Ketua tim mulai memikirkan hal-hal yang akan ditanyakan oleh Kominfo dan peserta yang hadir, misalnya terkait data perkembangan uji kompetensi PR di tahun 2024 yang diselenggarakan LSPPRI – BNSP, tentu tidak dimiliki datanya oleh Kominfo dan peserta rapat lainnya. Ketua tim PKM Untar memiliki informasi tersebut karena Ia adalah seorang asesor dari LSPPRI. Isi pemaparan terkait perkembangan uji kompetensi PR yang diselenggarakan LSPPRI yang berbasis kepada SKKNI Humas No 32, tahun 2022 dan tiga SKKNI dari profesi lainnya. Ketua tim memberikan pemaparan dengan menggunakan powerpoint melalui zoom untuk memudahkan ketua tim dalam menyusun alur pikir yang detail dan terarah untuk memudahkan peserta dalam menerima isi pesan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Pemaparan oleh ketua Tim adalah menjelaskan landasan SKKNI yang digunakan dalam membuat materi uji kompetensi PR yang dibuat oleh LSPPRI, yang telah disetujui oleh BNSP.

Pembuatan materi uji kompetensi PR mengacu pada SKKNI 32 tahun 2022 tentang Humas SKKNI Manajemen Sumber Daya Manusia, SKKNI Desain Grafis dan Komunikasi Visual, serta SKKNI MICE (*Meeting, Incentives, Conferences dan Exhibitions*). Hal ini tentu berbeda dengan materi uji kompetensi sebelum tahun 2024 yang masih mengacu pada SKKNI 629 tahun 2014 tentang Humas. Oleh karenanya, materi uji kompetensi PR tahun 2024 sudah sesuai dengan pekerjaan PR yang banyak berkaitan dengan pengolahan data secara digital.

Ketua PKM menjelaskan terkait 17 skema baru yang akan diuji kompetensikan kepada para profesional dibidang PR oleh LSPPRI. Sebelumnya, skema yang dimiliki oleh LSPPRI adalah delapan skema. 17 Skema dibuat berdasarkan kondisi pekerjaan humas saat ini dan jabatannya yang meluas, serta terkait dengan pengolahan data secara digital. Setelah menjelaskan skema-skema tersebut, Langkah berikutnya adalah menjelaskan terkait unit-unit kompetensi yang terdapat pada skema *Junior PR Officer*, yang akan digunakan oleh Kominfo sebagai basis dalam pembuatan modul pelatihan tahun 2024, untuk persiapan uji kompetensi kepada para peserta pelatihan. Berdasarkan penjelasan tersebut, ketua tim PKM memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk merevisi modul pelatihan untuk skema *junior PR officer*.

Gambar 1

Ketua Tim Sedang Menjawab Pertanyaan Dari Salah Satu Peserta



Gambar 2

Para Peserta Yang Hadir Dalam Diskusi Bersama Kominfo



Kebetulan Materi pelatihan PR yang dibuat pada tahun 2022 melibatkan Dr Muhammad Adi Pribadi sebagai salah satu dari tiga orang yang membuat modul pelatihan PR sehingga Ia mengetahui kekurangan yang dimiliki dalam modul pelatihan tersebut. Kelemahan dari modul ini

adalah masih mengacu pada SKKNI no 629 tahun 2014 sehingga materi pelatihannya terdapat memiliki ketidaksesuaian dengan materi uji kompetensi PR saat ini, walaupun beberapa materi dari modul pelatihan tersebut, masih relevan untuk digunakan.

4. KESIMPULAN

Pemaparan yang disampaikan oleh Ketua tim telah menjawab permasalahan yang dimiliki Kominfo dan peserta rapat lainnya terkait dengan modul pelatihan humas tahun 2022. Ketua tim menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian materi uji kompetensi yang berdasarkan pada SKKNI humas yang baru dan tiga SKKNI dari profesi lainnya sehingga modul pelatihan tahun 2022 sudah tidak relevan lagi digunakan karena modul pelatihan tersebut masih mengacu pada SKKNI no 629 tahun 2014. Oleh karenanya, Ketua tim menyuarakan kepada Kominfo. perlu membuat tim untuk menyusun modul pelatihan Humas dalam mempersiapkan peserta pelatihan di tahun 2024 dalam menghadapi uji kompetensi PR dan mampu bekerja di masyarakat.

Untar sebagai institusi pendidikan yang selalu mendukung kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, ternyata telah membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam upaya memberikan kesempatan kepada tenaga terampil untuk memperoleh sertifikat profesi dari BNSP. Oleh karenanya, peran serta dosen Untar yang terlibat kerjasama dengan pemerintah perlu didukung terus oleh Untar, agar bisa membantu pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan masyarakat

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara yang selalu mendukung kegiatan PKM dari sisi kesempatan dan dana, yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa/wi sehingga Kami bisa membantu pemerintah dalam upaya untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

REFERENSI

- Pribadi MA. 2018. *Dinamika Perkembangan Perusahaan Periklanan Indonesia: Studi Kasus Komunikasi dan Budaya Organisasi Dwi Sapta IMC dan Fortune Indonesia*. Universitas Padjadjaran (Disertasi).
- Charon, Joel M. 2007. *Symbolic Interactionism*. Pearson Education. New Jersey
- West, Richard. & Turner, Lynn H. 2010. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York : McGraw-Hill.